

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD
SEWA MENYEWA YANG DILAKUKAN
ANAK DI BAWAH UMUR**
(Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

WELLY FITRIANAH
NPM:1721030079



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD
SEWA MENYEWA YANG DILAKUKAN ANAK
DI BAWAH UMUR**

(Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan
Pringsewu Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

Welly Fitrianah
NPM. 1721030079

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

ABSTRAK

Sewa menyewa adalah suatu jenis akad yang diambil manfaatnya dengan jalan pergantian dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut. Sewa menyewa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka berakibat tidak sahnya sewa-menyewa tersebut. salah satu rukun dan syarat sewa-menyewa ialah *baligh* antara kedua belah pihak. Tetapi secara realita praktik yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa, seperti anak di bawah umur sudah dapat melakukan akad sewa menyewa playstation yang terjadi di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kec.Pringsewu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kec. Pringsewu dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kec. Pringsewu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Playstation (PS) Desa Podosari Kec.Pringsewu. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu praktik sewa-menyewa playstation

(PS) yang dilakukan anak di bawah umur, yang rata-rata usianya masih di bawah 15 tahun sudah berlangsung sejak lama dilaksanakan dalam menyewakan playstation. Pemilik menerapkan dua sistem yaitu sistem perjam dan harian, apabila penyewa menggunakan sistem harian maka tidak ada syarat apapun yang menjadi jaminan nya. Oleh karena itu anak yang masih di bawah umur sangat mudah menyewa menggunakan sistem harian tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa anak di bawah umur sah dilaksanakan karena objek yang dijadikan transaksi sewa-menyewa masih kategori ringan dan tidak bernilai tinggi serta *mumayyiz*, seperti pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yaitu apabila orang yang belum *baligh* sah melakukan akad sewa-menyewa asalkan telah *mumayyiz*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Welly Fitrianah
NPM : 1721030079
Jurusan/Prodi : Muamalah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Anak di Bawah Umur (Studi pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 8 April 2021

Penulis,



Welly Fitrianah
1721030079



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. endro Suratmin Sukarama, Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad
Sewa Menyewa yang dilakukan Anak di Bawah
Umur (Studi pada playstation (PS) Desa
Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu).
Nama : Welly Fitrianah
NPM : 1721030079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. endro Suratmin Sukarame, Bandar lampung, 35131 Tlp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWAKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi pada PS Playstation Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)** disusun oleh, **Welly Fitrihanah, NPM: 1721030079**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 April 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khairudin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.”*

(Al-Maidah: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. sehingga memberi kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Bapak Wagiman dan Ibu Sugiyanti yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, selalu memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan, perhatian, dan memberikanku dukungan baik dari fisik, moril, maupun materil.
2. Adikku Vitha Fadillah dan Virha Dhia Sarafana terimakasih atas dukungan selama ini serta pemberian semangat hingga skripsi ini selesai.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Welly Fitrianah, dilahirkan di Podosari, 11 Januari 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Wagiman dan Ibu Sugiyanti. Pendidikan dimulai dari Taman kanak-kanak Kh.Khalib Pringsewu pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Podomoro dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pringsewu dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pringsewu dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 8 April 2021
Yang Membuat

Welly Fitrianah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan Kenikmatan Imam, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa-Menyewa Anak dibawah Umur (Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya
2. Bapak Dr. H. Khairudin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak dan Ibu dosen maupun staf pegawai Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Raden Intan Lampung.

6. Pemilik Playstation Desa Podosari yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian
7. Deni Afrian, S.Kom. yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
8. Sahabatku Adelia Apriyani, Fani Tafdila, dan teman-teman kelas D yang telah membantu dan memberikan semangat, doa maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang setimpal atas keikhlasan Bapak/Ibu atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca

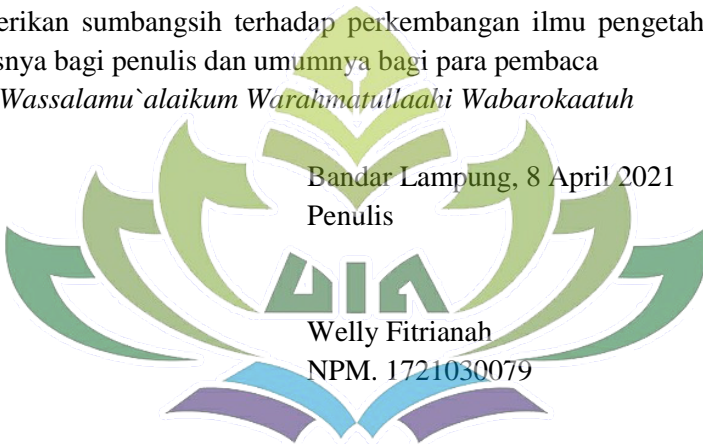
Wassalamu`alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Bandar Lampung, 8 April 2021

Penulis

Welly Fitrianah

NPM. 1721030079



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN..... | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Sistematika Penelitian..... | 13 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)..... | 15 |
| 1. Pengertian Sewa Menyewa | 15 |
| 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa | 16 |
| 3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa..... | 23 |
| 4. Hak dan Kewajiban pemilik dan penyewa | 27 |
| 5. Macam-macam Sewa Menyewa..... | 28 |
| 6. Hikmah Sewa Menyewa..... | 32 |
| 7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa | 33 |
| 8. Akad Sewa Menyewa..... | 35 |
| B. Anak Dalam Islam..... | 41 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. Pengertian Anak | 41 |
| 2. Ciri-Ciri Anak..... | 42 |
| 3. Fungsi Anak | 43 |
| 4. Hak dan Kewajiban Anak..... | 43 |
| C. Playstation | 48 |
| 1. Pengertian PS | 48 |
| 2. Jenis-Jenis PS | 50 |
| 3. Fungsi PS..... | 51 |

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Tentang PS Desa Podosari Kecamatan Pringsewu..... | 53 |
| 1. Sejarah berdirinya PS Desa Podosari Kecamatan Pringsewu | 53 |
| 2. Visi Misi PS Desa Podosari Kecamatan Pringsewu | 54 |
| 3. Pengelola PS Desa Podosari Kecamatan Pringsewu | 54 |
| B. Praktik Pelaksanaan Sewa-Menyewa Anak di bawah Umur Pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu..... | 55 |

BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Praktik Akad Sewa-Menyewa Anak di bawah Umur Pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu | 63 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa-menyewa Anak di bawah Umur pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu | 65 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Rekomendasi | 72 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa yang dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”.¹
2. Hukum Islam adalah berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum dan Islam”. Hukum bisa diartikan sebagai peraturan dan undang-undang. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam adalah agama Allah yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengajarkan dasar-dasar syariatnya dan juga mendakwahrkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk melakukannya.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 951.

² Izzomiddin, *Pemikiran Filsafat dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

3. Akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³
4. Sewa menyewa menurut bahasa (etimologi) adalah sewa menyewa yang berarti *Al-‘iwadl* yang artinya ganti dan upah (imbalan).⁴
5. Anak di bawah umur adalah anak yang masih memiliki perlindungan. Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.⁵

Beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang pelaksanaan praktik akad sewa menyewa anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad sewa menyewa tersebut, studi pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 46.

⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 129.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Sunnah.⁶ Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁷

Kegiatan dalam bermuamalah manusia akan saling berhubungan, saling tolong menolong sesamanya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang dimana Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, mudharabah, utang piutang, dan lain sebagainya. Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan dan jasa. Akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah saw pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad juga semakin beragam.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah*. *Al ijarah* (sewa menyewa) ialah: *al ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* (ganti). Dari sebab itu *ats Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *al ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan Al-qur'an dan sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong-

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 5.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 2.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

menolong. Menurut firman Allah, yang menjadi landasan dari *ijarah* adalah sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَجْرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(QS. Al-Qashash (28) : 26).

Sewa-menyewa terdapat rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus dipenuhi. Pertama adalah *shighat* (ijab Kabul) atau akad (perjanjian) dalam hal ini disyaratkan akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewakan itu dipergunakan atau dimanfaatkan. Kedua adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa harus sama-sama *baligh* dan berakal. Ketiga adalah obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁹

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, pada saat sewa menyewa berlangsung maka pihak yang menyewakan (*mua'jjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*mustajir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda, maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi sewa-menyewa sudah biasa dilakukan di masyarakat, bahkan anak-anak yang di bawah umur sudah mempraktikkan akad sewa menyewa seperti yang terjadi di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu

⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 131.

Kabupaten Pringsewu, terdapat permainan modern yaitu permainan playstation. Sewa menyewa playstation menjadi bisnis yang memiliki prospek baik di Kecamatan Pringsewu dengan konsumen kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa.

Bisnis playstation ini menggunakan konsep sewa-menyewa karena semua fasilitas playstation yang digunakan oleh konsumennya harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik playstation. Permainan playstation ini ada satu jenis playstation yaitu playstation tipe 2 (dua) dengan total 3 playstation, akad yang digunakan pada permainan ini akad sewa menyewa dengan sistem sewa hitungan jam, setiap 1/jam Playstation 2 (dua) dikenai biaya sewa Rp. 3000.

Praktiknya yang dilakukan oleh pemilik playstation telah melakukan perjanjian dengan anak di bawah umur, karena dengan biaya yang sangat terjangkau banyak anak-anak yang tertarik untuk menyewa *game* tersebut dan anak-anak pun tidak ada rasa terbebani dengan biaya sewa *game* tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan rukun dan syarat akad perjanjian sewa menyewa, karena dalam rukun dan syaratnya pemilik dan penyewa haruslah sama-sama *baligh*. Maka dari itu dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa yang dilakukan Anak di bawah Umur (Studi pada Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)."

C. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang penyewaan playstation kepada anak yang masih di bawah umur di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik akad sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur pada playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan ataupun dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada masyarakat ataupun bagi pembaca pada umumnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Podosari Kecamatan Pringsewu tentang Praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum Islamnya.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai informasi dari penelitian skripsi ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Fadhil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat dari Sudut Penerapan Teori *Sadd Al-Dzariah*).” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sewa-menyewa rental game playstation (analisis dilihat dari sudut penerapan teori *sadd Al-Dzariah*) ialah sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik PS dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuka peluang terjadinya tindakan mubazir dan maksiat karena tempat PS ini sering digunakan untuk ajang menghambur-hamburkan uang, tujuan dari para penyewa ini menyebabkan dalam bermain PS lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi penyewa.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M Fadhil yang membahas tentang analisis praktik sewa menyewa rental game playstation yang dilihat dari penerapan teori *Sadd Al-Dzariah* sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam praktik sewa-menyewa yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Novita Tunjung Sari fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, serta

¹⁰ M fadhil, “Praktik Sewa-Menyewa Rental Game Playstation di Kecamatan Syiah Kuala Analisis Dilihat dari Sudut penerapan Teori *Sadd Al-Dzariah* ” (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 4.

dokumentasi. Serta teknis analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan ialah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam praktik rental Playstation Home Game PS2 yaitu dengan memberikan sanksi berupa denda dan anti rugi kepada penyewa, pemberian sanksi ini sudah sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata tentang ganti rugi karena wanprestasi ataupun pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam praktik rental Playstation terhadap itikad tidak baik penyewa yaitu dengan denda dan ganti rugi sudah sesuai dalam ketentuan hukum Islam.¹¹ Berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan Novita Tanjung Sari yang membahas mengenai pemberian sanksi berupa denda atau ganti rugi kepada penyewa playstation karna telah melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewa playstation anak di bawah umur.

3. Nurul Istiqomah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Emas.” Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa emas yang dilakukan di Desa Kuala Sekampung tidak diperbolehkan karena dalam melaksanakan sewa tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa yaitu uang hasil penjualan emas yang disewanya, sedangkan uang tidak bisa dijadikan objek sewa-menyewa karena uang bersifat tidak permanen. Sewa-menyewa emas di Desa Kuala Sekampung mengandung

¹¹ Novita Tunjung Sari “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Playstation dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Hukum Islam Studi Kasus Rental Home Game PS2 di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar” (Skripsi, IAIN Tulungagung 2017), 9.

unsur yang dapat merugikan salah satu pihak yang dalam Islam dilarang keberadaanya.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah terletak pada pembahasannya yang membahas sewa-menyewa emas, manfaat yang menjadi objek sewa-menyewa emas ialah uang hasil dari penjualan yang disewakan, sedangkan uang tidak dapat dijadikan objek sewa-menyewa karena uang bersifat tidak permanen, sedangkan dalam penelitian ini membahas sewa-menyewa yang dilakukan anak dibawah umur sedangkan rukun dan syarat dalam sewa-menyewa ialah sama-sama baligh antara kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penulis menjelaskan mengenai sewa-menyewa yang dilakukan anak di bawah umur. Dari segi lokasi maupun dari bahasannya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini akan dilakukan di Playstation (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data

¹² Nurul Istiqomah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa-Menyewa Emas(Studi di Desa Kuala Sekampung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 2.

yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti. Dalam hal ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik akad sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur yang terjadi di Playstation Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penelitian dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian meliputi pemilik dan anak-anak penyewa game playstation.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an, buku fikih muamalah, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah:

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, jelas dan lengkap.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyewa

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 80.

yang datang rata-rata perharinya 10 orang dan 1 pemilik playstation.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, serta bagian yang akan dipelajari, diamati dan diteliti.¹⁶ Menurut Suharsimi Arikunto sampel yang digunakan apabila populasi kurang dari 100 maka dapat diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, tetapi jika lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 10 orang penyewa dan 1 pemilik playstation.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dipenelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra. Dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diselidiki, dan peneliti akan melakukan pengamatan. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik sewa-menyewa kepada anak di bawah umur.¹⁷

b. Wawancara

Metode interview (wawancara) adalah alat pengumpul data dengan cara tanya jawab secara lisan atau berbicara langsung antara peneliti dengan sumber

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Kencana, 2017), 144.

informasi secara sederhana. Adapun macam-macam dari wawancara diantaranya dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.¹⁸ Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.¹⁹

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah informasi yang didapatkan dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.²⁰

5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan data untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data apakah sudah cukup lengkap dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), 255.

yang dapat diamati. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dimulai dari gejala khusus atau kenyataan menuju pada teori yang umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan karya tulis ini. Sistematika penulisan dibagi dalam bab per bab yaitu:

Bab I adalah **pendahuluan** yang berisi meliputi sub bab, antara lain **penegasan judul bagian ini** berisi penjelasan tentang kata kunci dari **judul yang berkaitan** serta menegaskan apa maksud dari **judul karya tulis ini**, **setelah itu** latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang **sewa menyewa anak di bawah umur**, kemudian dari latar belakang tersebut berisi rumusan masalah yang mengkaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu **tujuan penelitian**. Apabila tujuan sudah ditetapkan maka penting juga diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi penelitian untuk pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya terdapat kajian penelitian dahulu yang relevan berisi tentang informasi penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya pada sub bab terakhir bagian ini menjelaskan sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab II Landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Sewa menyewa yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya sewa menyewa serta pengertian akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Pengertian anak dan hak-hak anak.

Bab III deskripsi objek penelitian, tentang gambaran umum hasil penelitian sewa-menyewa playstation di Desa Podosari, yang memaparkan sejarah berdirinya Desa Podosari, terbentuknya usaha playstation dan praktik pelaksanaan sewa-menyewa playstation di Desa Podosari kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Bab IV Analisis penelitian, yaitu hasil penelitian berisi paparan dan uraian data-data yang telah diperoleh yaitu analisis praktik pelaksanaan sewa-menyewa playstation yang dilakukan anak di bawah umur, dan analisis hukum Islam sewa-menyewa playstation yang dilakukan anak di bawah umur.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan. Rekomendasi merupakan anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa-menyewa

Pengertian *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata “*ajara-ya’jiru*” yang artinya upah yang diberikan sebagai imbalan sebuah pekerjaan.¹ Sedangkan menurut istilah *ijarah*, adalah suatu jenis akad yang diambil manfaatnya dengan jalan pergantian.² Para ulama berbeda-beda mendefinisikan sewa-menyewa antara lain:

a. Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى أَلْمَنَّا فَعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”³

b. Menurut ulama Asy-Syafi’iyah, sewa menyewa adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau dibolehkan dengan imbalan tertentu.⁴

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تَمْلِيْكُ مَنَّا فَعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”⁵

d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk waktu

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Cet. Ke-3(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 101.

² Yadi janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

³ Syafe’I Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 122

tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan,⁷ apabila akad sewa-menyewa telah berlangsung penyewa sudah berhak mengambil manfaatnya dan pemilik barang tersebut berhak mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (pergantian).⁸

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak serta salah satu bentuk tolong menolong. Karena tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual beli oleh karena itu seperti yang ditegaskan Ibnu Rusyd, dan semua ulama dari ahli fikih mengizinkan hukum sewa-menyewa bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis-hadis dan ketetapan *ijma'*.⁹

Landasan *ijma'* nya ialah kebolehan hukum sewa menyewa dilakukan karena tidak ada seorang ulama yang membantah *ijma'* tersebut. Akibat hukum dari *ijarah* adalah tetapnya hak milik manfaat bagi penyewa dan tetapnya hak milik atas upah sewa bagi yang telah menyewakan.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan sewa-menyewa sebagai berikut:

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 85-86.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), 15.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 152.

- a. Dasar hukum sewa menyewa dalam Al-Qur'an Q.S. At-Thalaq (65) ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أٰخَرٰى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-talaq (65): 6)

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui ialah pengambilan manfaat dari orang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukanlah harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu yaitu menyusukan anaknya kepada

orang lain, dan dari sinilah muncul istilah saudara satu susuan, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa'diyah.¹⁰

Q.S. Al-Qashash (28): 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS.Al-Qashash (28) : 26)

Ayat di atas menjelaskan tentang Nabi Musa As yang disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan. Q.S Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi:

¹⁰ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas*, no. Vol. 5 no.1 (2013): 3, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۚ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
(QS Az Zukhruf (43): 32)

b. Dasar hukum sewa menyewa dalam As-Sunnah

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Seseorang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain tentu mengharapkan upah agar segera dibayar dan tidak diitunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, menurut Rasulullah seseorang seharusnya membayar upah orang yang bekerja sesegera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)¹¹

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Madjah).

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan orang yang sudah memberikan jasanya itu sangat membutuhkan upah tersebut. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi sangat lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW.

Wajib diketahui tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan kemudahan kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mempunyai harta tetapi tidak dapat bekerja melakukan sesuatu, begitupun sebaliknya seseorang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang tidak memiliki harta. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan sama-sama mendapatkan manfaat.¹²

c. Dasar hukum sewa menyewa dalam *Ijma*

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid disuatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad.¹³ Para

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terjemahan H. Iqbal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 421.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 277-278.

¹³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 74.

ulama telah bersepakat tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Tujuan disyariatkan nya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam kehidupan mereka, dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dalam bentuk sewa menyewa manfaat maupun dalam bentuk sewa menyewa upah mengupah.¹⁴ Dari tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syara'.

3. Rukun dan syarat sewa menyewa

a. Rukun sewa menyewa

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan ibadah atau perbuatan. Bila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum, begitu juga dalam melaksanakan akad sewa menyewa. Rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*) telah diatur dalam hukum Islam.

Menurut mazhab Hanafi, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu *ijab* (keinginan untuk menyewa) dan *qabul* (tanggapan persetujuan terhadap sewa-menyewa). adapun menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun sewa-menyewa ada empat,¹⁵ yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa, terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik barang atau jasa, *musta'jir* adalah orang yang menyewa barang atau jasa. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap hukum dapat membedakan yang baik dan yang buruk serta

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), 217.

¹⁵ Indri, *Hadis Ekoonomi I*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 235.

baligh.¹⁶ *Baligh* menurut hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan. Menurut ulama Syafi'i transaksi yang dilakukan seseorang yang belum *baligh* tidak sah sebab tidak adanya kecakapan hukum, akan tetapi jika belum dewasa atau belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid, seperti pendapat Mazhab Hanafiyah dan Maliki transaksi anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya serta *mumayyiz* dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi bisnis khususnya untuk barang-barang yang kategorinya kecil dan tidak bernilai tinggi. Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Sehubungan dengan tidak adanya keterpaksaan, akan menghindarkan ketidakrelaan dari kedua belah pihak dan akibat akibat buruk lainnya, dan apabila ada salah satu pihak yang dipaksa untuk menyewakan barangnya, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap batal.

- 2) *Sighat* yaitu *ijab dan qabul*. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab “*Al-‘Aqdu*” yang artinya

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 157.

perikatan, perjanjian. Sedangkan menurut istilah yaitu pertalian *ijab* atau pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* berpengaruh menerima ikatan, sesuai dengan kehendak *syari'at* yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁷ Sewa menyewa terjadi apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara pemilik dan penyewa atas barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. *Qabul* ialah jawaban yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab* untuk menyatakan persetujuannya.¹⁸

3) *Mau'qud alaih* yaitu barang yang disewakan (objek akad), seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, utang yang dijaminkan dalam akad kafalah.¹⁹ *Mau'qud alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a) Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan sesuai kegunaannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya atau kegunaannya barang tersebut. seandainya barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak dapat digunakan

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

¹⁹ Oni Sahroni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori dan Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 37.

sebagaimana mestinya yang sudah diperjanjikan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

- b) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
 - c) Barang yang disewa adalah boleh menurut syara' dan tidak dilarang atau diharamkan. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, contohnya sewa-menyewa rumah untuk prostitusi.
 - d) Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.
- 4) *Ujrah* adalah upah atau imbalan. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam akad sewa menyewa.

b. Syarat *Ijarah*

Syarat adalah suatu ketentuan yang harus terpenuhi dalam melakukan ibadah atau perbuatan, dan jika syarat itu tidak terpenuhi maka perbuatan atau ibadah tersebut akan dianggap tidak sah dan cacat menurut hukum. Dalam akad *ijarah* adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad

Kedua belah pihak yang melakukan akad sewa menyewa haruslah *baligh*. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan sewa menyewa telah memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk itu dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam bermuamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Sehingga segala tindakan yang dilakukan

dapat dipandang sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa dalam melakukan akad tidak harus *baligh*, anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan sewa menyewa dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.²⁰

2) Adanya keridhaan kedua belah pihak

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, dan atas kemauan sendiri. Dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan adanya unsur pemaksaan, karena sewa menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.²¹ Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa 4:29



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

²⁰ Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), 236.

²¹ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 145.

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa 4:29)

3) *Ujra*

Disyaratkan bahwa upah atau imbalan dalam akad sewa menyewa harus jelas adanya. Imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya.²² Harga sewa harus dibayar, bila berupa hal lain harus ditentukan berapa kadarnya, jika harga sewa tidak dibayar, maka penyewa mempunyai utang yang harus dilunasi.

4) *Ma'uqud alaih*

Ma'uqud alaih yaitu barang yang dijadikan objek sewa menyewa. Syarat-syarat yang diperbolehkan dan sah dijadikan objek sewa menyewa yaitu:

- a) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad berlangsung, maka tidak sah apabila melaksanakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada. Menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagai pengikut Imam Hanbali bahwa objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. Ibnu Qayyim juga berkata bahwa *illat* pelarangan *bai' ma'dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksud

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 117

disini ialah sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan baik barang itu pada waktu akad ataupun tidak.

- b) Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Seandainya barang yang telah diperjanjikan tidak dapat digunakan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.
- c) Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa lama waktunya sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- d) Kemanfaatan obyek harus diperbolehkan oleh agama, barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh hukum Islam tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Contohnya perjanjian sewa menyewa yang digunakan untuk menjual minuman keras atau tempat perjudian.
- e) Orang yang menyewakan ialah pemiliknya, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang menyewakan benda yang bukan miliknya, meskipun saudara atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali atau mendapat izin untuk mewakilinya.

4. Hak dan Kewajiban Pemilik dan penyewa

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian yaitu:

a. Pihak pemilik

- 1) Memelihara barang yang disewa, sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
- 2) Wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
- 3) Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya telah ditentukan
- 4) Berhak menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.

b. Sedangkan dari pihak penyewa yaitu:

- 1) Penyewa wajib memakai barang yang disewa
- 2) Penyewa membayar upah sewa yang telah ditentukan.
- 3) Penyewa berkewajiban mengembalikan barang tersebut apabila sewa-menyewa telah berakhir.
- 4) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.

5. Macam-macam sewa menyewa

Berdasarkan uraian definisi tentang sewa-menyewa, serta rukun dan syarat yang mana telah dijelaskan di atas, Menurut objeknya macam-macam *ijarah*, ulama fiqh membagi akad *ijarah* menjadi dua macam yaitu:

- a. *ijarah* yang bersifat manfaat, dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Menyewa dengan memanfaatkan benda yang kelihatan dan dapat dirasa. Seperti menyewa sebagian tanah, atau sebuah rumah yang sudah jelas untuk ditempati dan lain-lain. Akad sewa menyewa diperbolehkan atas manfaat yang mubah, Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak dapat disewakan,

karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaatnya.²³

- 1) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat diketahui dengan memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
 - 2) Barang *ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak barangnya tidak cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *ijarah* harta benda yang bukan milik sendiri
 - 3) Barang *ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak barangnya tidak cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *ijarah* harta benda yang bukan milik sendiri.
 - 4) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara' misalnya menyewakan untuk transaksi narkoba dan lain-lain.
 - 5) Benda yang disewakan harus manfaat langsung dari benda tersebut. misalnya menyewakan rumah untuk ditempati tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya.
 - 6) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat nya dan pengurangan sifatnya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang bangunan. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, jasa dan lain-lain,

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 330.

kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *Musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *Mu'ajjir*,²⁴ dan pembayaran upahnya setelah berakhirnya pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan dengan syarat ketentuan, Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari atau seminggu, harus ditentukan dan harus diuraikan pekerjaannya. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang.

Adapun pada awalnya jenis sewa-menyewa terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi sekarang ini setelah terjadi perkembangan zaman dalam bidang muamalah, maka jenisnya pun sangat beragam, yaitu:

1) Sewa menyewa rumah

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara menyewakannya kembali, hal ini diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewakan nya. Selain itu pihak penyewa berkewajiban untuk menjaga rumah tersebut. Hukum Islam menjelaskan dalam berinteraksi bermuamalah ada dua pertimbangan yang perlu diperhatikan, pertama pertimbangan masalah halal haram. Kedua mempertimbangkan manfaat. Dalam Islam ketika

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

manfaat dan kegunaannya untuk suatu hal yang mubah tidak dilarang oleh hukum *syara'*, dan tidak ada bentuk tolong menolong dalam dosa ataupun maksiat.

2) Sewa-menyewa perburuan

Selain sewa-menyewa barang, ada juga persewaan tenaga atau jasa disebut perburuan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan, dan diberi upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

3) Sewa menyewa tanah

Dalam hukum Islam sewa-menyewa tanah dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu dimanfaatkan untuk pertanian atau pondasi bangunan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyewa tanah, yaitu untuk apa tanah tersebut digunakan, apabila tanah tersebut digunakan untuk pertanian, maka harus dijelaskan tanaman yang ditanam di tanah tersebut, karena manfaat tersebut yang akan mempengaruhi jangka waktu sewa-menyewa dan untuk menentukan jumlah uang sewa yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah.

4) Sewa menyewa kendaraan

menyewakan kendaraan diperbolehkan, dengan syarat dijelaskan waktu dan tempatnya, disyaratkan juga untuk kegunaannya secara jelas, apakah menyewa untuk mengangkut barang, apa yang diangkut dan siapa yang akan membawa kendaraan tersebut.

6. Hikmah Sewa Menyewa

Hikmah disyari'atkannya sewa menyewa dalam bentuk upah atau pekerjaan sangatlah besar, karena sewa-menyewa dibutuhkan sesama manusia. Tujuan diperbolehkannya sewa menyewa pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil, tetapi bukan itu tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah dalam menyewakan ialah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak jelas manfaatnya, yaitu hanya memperkirakan nya. Oleh karena itu akad harus diutamakan dalam suatu sewa menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang disembunyikan antara kedua belah pihak. Beberapa hikmah dari sewa menyewa yaitu:

1. Saling memenuhi kebutuhan dalam bermasyarakat, dengan adanya sewa menyewa khususnya pemanfaatan jasa, maka akan mampu memenuhi keinginan seseorang baik yang bekerja maupun yang menikmati jasanya, oleh karena itu sewa menyewa merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong.
2. Dengan adanya sewa menyewa maka mampu membina kerja sama antar kedua belah pihak antara *mu'jir* dan *musta'jir*, sehingga menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang telah memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan nya. Dan adanya transaksi sewa-menyewa maka berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram.

3. Adanya sewa menyewa tersebut maka seseorang dapat menerima manfaat dari barang atau jasa yang disewakan dan dapat menerima upah dari hasil yang disewakan.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

a. Batalnya sewa menyewa

Sewa menyewa yaitu jenis akad lazim akad yang salah satu pihak berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, bahkan jika salah satu pihak meninggal, perjanjian sewa menyewa tidak akan batal, asalkan yang menjadi objek sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah sebagai pihak *mua'jir* atau *mustajir*.²⁵

Tidak menutup kemungkinan pembatalan akad oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat. Adapun hal yang menyebabkan batal sewa menyewa, yaitu:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada pihak penyewa
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, apabila barang yang dijadikan objek akad sewa menyewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, contohnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa.
- 3) Tercapainya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa yang telah di tentukan.
- 4) Adanya *uzur*, yang dimaksud *uzur* ialah sutau halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Contohnya

²⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.

seseorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya habis terbakar, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.

b. Berakhirnya sewa menyewa

Waktu sewa-menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan dengan utuh. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Sewa menyewa berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, akad sewa-menyewa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sewa-menyewa hanya hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Ulama berpendapat sifat akad sewa-menyewa adalah akad *lazim* (mengikat para pihak), seperti halnya dengan jual beli. Atas dasar ini mayoritas ulama berpendapat, sewa-menyewa tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu manfaat dari sewa-menyewa dapat diwariskan sampai berakhirnya akad.
- 2) Akad sewa-menyewa berakhir dengan menarik kembali. Sewa-menyewa ialah akad *mu'awadhhah* disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti pada akad jual beli
- 3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur
- 4) Manfaat yang tepenuhi atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali ada *uzur* atau halangan.

8. Akad Sewa Menyewa

Akad berasal dari bahasa adalah ikatan atau mengikat. ikatan maksudnya adalah menghubungkan dua ujung tali saling mengikat hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.²⁶

Menurut istilah terminologi ulama fikih melihat akad dari dua aspek yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian akad secara umum

Pengertian akad dalam arti luas menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.²⁷

b. Pengertian akad secara khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dalam berakad diantara dua orang atau lebih, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad sehingga terhindar dari suatu kesepakatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²⁸

Dasar Hukum Akad yaitu, QS. Al-Maidah ayat 1:

²⁶ Germala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Premadamedia Group, 2018), 43.

²⁷ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

²⁸ Ibid., 45.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 هَيْمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah 5:1)

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perjanjian yang dibuatnya, maka perjanjian yang dibuat tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Para ulama mengemukakan rukun akad adalah sebagai unsur yang membentuk akad, bahwa akad memiliki empat rukun yaitu:

- 1) *Aqid* adalah para pihak yang membuat akad atas keinginannya sendiri. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* yaitu: *Ahliyah* ialah para pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian. Kecakapan hukum adalah kelayakan menerima hukum dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui semua tindakan-tindakannya secara hukum.²⁹ *Ta'adud* yaitu akad tidak dibuat oleh diri

²⁹ Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 172.

sendiri, harus melibatkan orang lain. Perjanjian tidak tercipta apabila hanya ada satu pihak yang membuat *ijab* saja atau *qabul* saja, sebab dalam setiap akad selalu ada dua pihak atau lebih. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang bisa melaksanakan sendiri beserta kewajibannya, keadaan ini disebut dengan “*mahjur Alaih*” sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an an-Nisa (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4): 5)

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan *as-sufaha*. *As-shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalnya dalam memelihara hartanya dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, ataupun orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Sehubungan dengan ini, Abdul Manan mengatakan bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan harus *baligh*, berakal sehat, dewasa, dan cakap hukum. Oleh karena itu tidak sah akad apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang

gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuhan.³⁰

2) *Sighat al'aqd* adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali muncul dari suatu pihak yang menunjukkan kerelaan untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan *qabul* adalah jawaban yang keluar dari pihak yang berakad menyetujui *ijab* dan dengannya tercipta suatu akad.³¹

3) *Ma'qud Alaih* yaitu benda-benda yang akan diakadkan. Ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad yaitu:

- a) Objek akad dapat diserahkan
- b) Objek akad dapat ditentukan
- c) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki)
- 4) *Maudhu' al-aqd* adalah tujuan akad yaitu ujung akhir yang ingin dituju oleh para pihak yang membuat akad. Syarat dari tujuan akad adalah akad tersebut tidak bertentangan dengan syara.

Adapun syarat-syarat akad meliputi:

1. Syarat *in'iqad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terwujudnya suatu akad dalam zatnya yang sah menurut syara', dan apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.
2. Syarat sah yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad, dan apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid* atau rusak.

³⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

³¹ Ibid., 17.

3. Syarat *Nafadz* (kelangsungan akad) adalah adanya kepemilikan. Orang yang melakukan akad haruslah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditanggungkan).
4. Syarat *Luzum*, Pada dasarnya setiap akad sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikat suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* atau pilihan, yang memungkinkan *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut dan boleh membatalkan akad.

Sahnya akad dilihat dari syarat-syarat keabsahan untuk menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan, setelah rukun akad sudah terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi akad belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap rusak.
- b) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat.
- c) Bebas dari *gharar* ialah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- d) Bebas dari riba

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya suatu akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut meskipun rukun dan syarat ini sudah terpenuhi, akad tidak sah dan disebut *fasid*, maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat

terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya yang dimaksudkan tidak terpenuhi.

Adapun yang dapat membatalkan akad yaitu secara etimologi kata batil berasal dari kata bahasa arab "*bathil*" yang artinya batal, atau tidak sah. Ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil yaitu akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuk akad tersebut tidak terpenuhi akad tersebut batil tidak ada wujudnya.³² Apabila pokoknya tidak ada, otomatis tidak sah sifatnya.

Waktu yang telah ditetapkan dalam akad berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan pada pemilik adapun ketentuan untuk mengembalikan barang yang disewakan yaitu, apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan benda bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pemilik dengan cara menyerahkan langsung barangnya, contohnya menyewa mobil dan apabila benda yang disewakan berupa benda yang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan kepada pemilik dalam keadaan kosong, artinya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, contohnya menyewa rumah. Jika benda yang disewakan berupa tanah maka penyewa wajib mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 45.

B. Anak Dalam Islam

1. Pengertian anak

Pengertian anak dalam hukum Islam adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*. Batasan usia bagi anak yang bisa berdiri sendiri atau dewasa berusia 21 tahun, selama tidak memiliki cacat fisik atau penyakit mental atau belum menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi’I, Imam Ahmad batasan usia anak yang *baligh* ialah berumur 15 tahun. Jadi jika anak yang sudah berusia 15 tahun maka dia dianggap sudah *baligh*. Menurut sebagian besar ulama mazhab Maliki, batasan usia *baligh* ketika sudah berusia 17 tahun atau 18 tahun.³³ Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Apabila kedua orang tua tidak mampu, pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu memenuhi kewajiban orang tuanya. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang yang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan *baligh* apabila sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila telah mengalami haid atau menstruasi

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya dengan kata lain, kondisi seseorang dimasa dewasa

³³ Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam,” *Yudisia* Vol.8 no. 1 (2017): 88, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima dimasa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat itu sendiri terdiri dari beberapa susunan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa kearah yang lebih baik. Oleh karena itu dalam menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya satau pembinaan secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya.

Berbicara perlindungan terhadap anak tidak pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil sprititual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁴

2. Ciri-Ciri Anak

Mengacu pada aspek psikologis, perkembangan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari perkembangan jiwa dan cara berpikirnya. Anak yang masih di bawah umur mempunyai ciri-ciri yaitu:

³⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 1.

- a. Pertumbuhan dan perkembangan yang belum matang.³⁵
- b. Tidak dapat bekerja sendiri (mandiri).
- c. Tidak cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk bertanggung jawab.
- d. Tidak dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- e. Masa kemampuan berpikir yang masih lemah.

3. Fungsi Anak

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu, karena sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Karena itulah peranan orang tua menjadi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu seorang anak sangat berperan penting untuk bangsa dan Negara karena diharapkan untuk menjadi penerus bangsa yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pemegang kendali di masa depan suatu Negara.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Agama Islam berisi aturan-aturan hidup manusia di dunia. Untuk itu dalam ajaran Islam juga diatur adanya hak dan kewajiban sebagai bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki setiap orang. Maka dari itu perlu sekali untuk diperhatikan hak dan kewajibannya serta pendidikannya demi masa depan anak.

Hak anak dalam Islam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya.

³⁵ Suryana, *Keperawatan anak untuk Siswa Spk*, Cet.1, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1996), 1.

Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.³⁶ berikut adalah beberapa hak dan kewajiban anak yaitu:

a. Hak hidup dan tumbuh berkembang

Setiap makhluk hidup di alam semesta ini, semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak.³⁷ Setelah lahir setiap anak berhak untuk bertahan hidup di dunia. Dengan terus bertahan hidup, tentunya hak dan kewajiban akan terlaksana. Karena pada dasarnya, bertahan hidup tidak lepas dari melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Al-An'am 6:151



³⁶ Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, (Jakarta: ELSAM, 1997), 9.

³⁷ Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak* (Semarang: Alpirin, 2019), 3.

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ

وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)." (Q.S. Al-An'am 6:151)

b. Hak Pangan

Sebagai makhluk hidup, anak juga membutuhkan makanan supaya dapat bertahan hidup dan beraktivitas dengan baik. Minimal anak harus mendapatkan makanan bergizi 3 kali dalam sehari untuk menunjang aktivitas dan juga menjaga kesehatan. Sebaiknya makanan yang setiap harinya dikonsumsi oleh anak haruslah memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah artinya belanja atau memenuhi kebutuhan pokok. Maksudnya yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kebutuhan pokok itu seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Para ahli fikih membagi orang-orang yang berhak

menerima nafkah dari seseorang itu ada 4 macam, pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek. Kedua, *nafkah furu'* yaitu anak, cucu, terus ke bawah. Ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, dan yang terakhir, nafkah istri.³⁸ Dari pembagian yang berhak menerima nafkah, salah satunya adalah anak-anak (*nafkah furu'*). Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri.

d. Hak mendapatkan pendidikan

Anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi anak sesuai bakat dan minatnya, tetapi sekarang ini masih banyak anak-anak jalanan yang terlantar yang belum menyentuh dunia pendidikan. Seharusnya anak-anak jalanan yang terlantar itu bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Karena masa anak-anak mereka yang seharusnya mereka habiskan di bangku sekolah, tetapi menjadi sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Tahrim (66): 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

³⁸ Ahyuni yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah* (Makasar: Humanities Genius, 2020), 57.

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6)

e. Kewajiban Kepada Allah

Setiap individu tidak lepas dari penciptanya yaitu Allah Swt. karena Allah Swt yang menciptakan dan memelihara alam termasuk manusia sehingga kewajiban sebagai hamba hanya ibadah. Kewajiban anak beribadah kepada Allah untuk memenuhi tujuan hidup di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah. Dalam Q.S Adz Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S Adz Dzariyat ayat (51): 56)

Makna ayat di atas mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah untuk mengabdikan kepadanya, bukan kepada yang lain. Konsekuensi logis pengakuan iman kepada Allah adalah penerimaan secara mutlak dan sadar atas segala perintah-perintah yang diberikan Allah dan akan tetap melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

f. Kewajiban dalam keluarga

Berbakti kepada kedua orang tua. Setiap anak wajib berbakti kepada orang tua, contoh perwujudan rasa berbakti pada orang tua adalah menghormatinya, tidak berkata-kata kasar pada orang tua, mendoakan orang tua baik ketika masih hidup atau sudah tiada, juga dalam hal ini menunaikan janji orang tua. Berbakti kepada orang tua sebaik mungkin merupakan amal yang paling baik

untuk dijadikan sebagai sarana masuk surga dan jalan untuk meraih derajat yang paling luhur di dalamnya.

g. Kewajiban sosial dan bernegara

Seseorang disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial seorang anak wajib menghormati individu lain sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh seorang anak kewajiban tolong-menolong, saling membantu dan menghormati sesama. Di dalam ajaran Islam menekankan atas kewajiban sebagai seorang muslim dengan sesama muslim harus dijalankan. Selain itu juga seorang anak mempunyai kewajiban dalam lingkup yang lebih luas yaitu kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Menghormati antar bangsa dan Negara tanpa membedakan. Seorang muslim wajib menjunjung tinggi kehormatan negaranya karena Negara merupakan wahana penting untuk mencapai tujuan hidup. Islam menganjurkan menjunjung tinggi rasa kebangsaan.

C. Playstation

1. Pengertian PS

Playstation merupakan sebuah *game* konsol yang menggunakan grafis dari era 32-bit ini juga biasa disebut sebagai PSX. Playstation adalah *game* konsol inovatif yang pertama kali menggunakan CD sebagai media penyimpanan, bukan catridge. Playstation pertama kali diluncurkan di Jepang pada 3 Desember 1994, Amerika Serikat pada 9 Desember 1995, dan Eropa pada 29 September 1995.³⁹

Playstation ialah peralatan elektronik yang terhubung ke TV dan muncul permainan yang diinginkan.

³⁹ Aliseptionsyah, "Sejarah Playstation," Wordpress, 2015, <http://aliseptionsyah.wordpress.com/2015/05/26/sejarah-playstation.html>. diakses pada 5 Maret 2021 19:40 WIB.

Playstation harus memasukkan CD kedalam peralatan itu supaya bisa bermain, pemain harus menggunakan stick yang berisi sejumlah tombol. Satu playstation dapat dimainkan satu sampai dua orang.

Hukum asal dari playstation atau *game* komputer. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاثَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)"*⁴⁰

Permainan playstation sesungguhnya ialah bagian dari sarana hiburan sarana untuk melepas lelah. Islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, itulah orientasi tunggal yang harus dipegang umat Islam ketika menjalani kehidupan. Islam lalu memerintahkan umatnya agar melaksanakan perintah Allah swt dan tidak melanggar larangan-larangan Allah swt.

Permainan yang diposisikan sebagai sarana untuk hiburan oleh Islam dipandang suatu hal yang wajar dan dibolehkan, mengingat aspek sosial yang terdapat masalah yang cukup vital dan tidak bisa dipandang remeh, yaitu sebagai fasilitas efektif untuk mendekatkan kembali antar individu satu dengan yang lainnya yang nampak renggang akibat kesibukan masing-masing selama beberapa waktu agar utuh dan harmonis seperti sediakala. Melalui sarana ini dapat mengakrabkan persaudaraan dan persahabatan yang mulai tampak renggang. Namun demikian Yusuf al-Qordhowi, mengingatkan bahwa syariat memberi batasan terhadap jenis permainan agar dapat dikonsumsi khalayak umum diantaranya:

⁴⁰ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 41.

1. Permainan yang mengandung unsur bahaya hilangnya nyawa seseorang seperti tinju dan gulat.
2. Permainan yang memperlihatkan aurat perempuan, seperti renang.
3. Permainan sulap yang menggunakan ilmu sihir atau mengandung unsur magis.
4. Permainan yang mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain.
5. Perlombaan yang berbentuk penyiksaan terhadap hewan.
6. Permainan yang mengarah pada taruhan yang mengandung unsur judi.
7. Permainan yang mengarah pada penghinaan mengolok-olok orang lain.⁴¹

2. Jenis-Jenis PS

a. Playstation 1

Playstation 1 biasa disebut PS1, PS1 resmi diluncurkan pada tahun 1994. Pada zamannya produk ini berhasil memimpin dunia game sehingga sukses merebut perhatian para gamer. Salah satu alasan orang-orang banyak menaruh pilihannya pada PS1 karena game yang disediakan tersimpan menggunakan *compact disc* (CD). Playstation 1 dibekali dengan ram sebesar 2 mb, serta resolusi 640X480 dan untuk menginput gambar, PS1 menggunakan kabel merah, putih, kuning yang disambungkan ke televisi.

b. Playstation 2

Konsol permainan seri kedua dari playstation yaitu hadir dengan nama playstation 2 atau PS2. Pengembangan konsol tersebut diperkenalkan pada tahun 1999 dan diluncurkan pada tahun 2000. Playstation 2 berbentuk tebal

⁴¹ Imam Nur Hidayat, "Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Hidayat)". *Unida*, 9, no. 1 (2015): 108, <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v9i1.2569>.

dan besar tapi mengalami peningkatan menjadi lebih slim dan kecil. Mengenai display PS2 masih menggunakan metode yang sama dengan PS1 berupa kabel tiga warna.

c. Playstation portable

Playstation kali ini menampilkan bentuk yang berbeda yaitu Playstation dalam bentuk portable (PSP) yang merupakan konsol permainan genggam. Playstation tipe ini diluncurkan pada tahun 2003, PSP memiliki fitur yang tidak hanya menampilkan game PSP dapat memunculkan video, dan foto. PSP juga mempunyai dukungan baterai yang dapat di charge dan dilepas, Wi-Fi, dan layar yang lebih lebar.

d. Playstation 3

Setelah PSP, Sony meluncurkan Playstation 3 pada tahun 2006, Playstation 3 dirilis dengan dua varian, basic dan premium. Dengan spesifikasi sistem CPU 6 core cell, dan ram sebesar 265 MB. Kelebihan dari PS3 tidak hanya untuk bermain game, PS3 hadir pertama dengan konsol yang dapat remote play serta memiliki banyak aplikasi hiburan.

e. Playstation 4

Playstation 4 ialah perkembangan terbaru dari Playstation sebelum-sebelumnya, Playstation ini memiliki teknologi touchscreen yang beberapa juga ada tombolnya. PS4 pertama kali dirilis pada tahun 2013. PS4 dibekali dengan ram sebesar 8 GB dan vram 1 GB.

3. Fungsi PS

- a. Menghilangkan kepenatan setelah seharian melakukan aktivitas yang melelahkan.
- b. Meningkatkan konsentrasi karena terdapat permainan yang dibuat berlevel, dan setiap level memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Agar dapat berhasil melewati

level yang sulit, pemain dituntut untuk berpikir dan memakai logikanya

- c. Mempererat persahabatan karena bermain playstation dapat dimainkan lebih dari satu orang sehingga dapat bermain bersama.



DAFTAR RUJUKAN

- Adesy Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: rajaGrafindo Persada, 2016.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Ibnu Majah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Anggito Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Pers, 2001.
- Anwar Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 27.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. Ke-9 Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewi, Gemala dkk *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Kencana Premadamedia Group, 2018.
- Djamil faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet Ke-III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Hidayat Imam Nur, *Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Hidayat)*. Unida, 9 no.1 2015.

Hilal Syamsul, *Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat, Asas*, Vol. 5 No. 1 2013.

Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2017.

Izzomiddin, *pemikiran filsafat dan hukum islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Janwari Yadi, *.Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2000.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Cet. Ke-1, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam," *Yudisia* Vol.8 no. 1 2017.

Pasaribu, Chairuman dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rachmat, Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rochman Meuthia G.at. Al., *HakAsasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*. Jakarta: elsam, 1997.

Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Alma"arif, 1997.

Sahroni Oni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori dan Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 Jakarta: RajaGrafindo, 2016.

Supriadi Dedi, *Ushul Fiqh Perbandingan*. Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Suryana, *Keperawatan anak untuk Siswa Spk*. Cet.I, Jakarta: Kedokteran EGC, 1996.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. Ke-1Bogor: Kencana, 2003.

Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alpirin, 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan Sayyidan, sebagai Penyewa Playstation, tanggal 8 Desember 2020

Wawancara dengan Fanu, sebagai Penyewa Playstation, tanggal 16 Desember 2020

Wawancara dengan Fery, sebagai PenyewaPlaystation, Tanggal 9 Januari 2021

Wawancara dengan Fikri, sebagai Penyewa Playstation, tanggal 31 Desember 2020

Wawancara dengan Hafiz, sebagai Penyewa Playsation, tanggal 8 Desember 2020

Wawancara dengan Erni, sebagai pemilik playstation, tanggal 22 November 2020

Wawancara dengan Mafud, sebagai Penyewa Playstation, Tanggal 9 Januari 2021

Wawancara dengan Meikel, sebagai Penyewa Playstation, tanggal 31 Desember 2020

Wawancara dengan Putra, sebagai Penyewa playstation, tanggal 28 November 2020

Wawancara dengan Raden, sebagai Penyewa Playstation, tanggal 8 Desember 2020

Wawancara dengan Vio, sebagai Penyewa playstation, tanggal 28 November 2020

Wordpress,2015,<http://aliseptiansyah.wordpress.com/2015/05/26/sejarahplaystation.html>, diakses pada 5 Maret 2021 19:40 WIB.

Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. Makasar: Humanities Genius, 2020.

